

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Permohonan Pembimbing TA .....	89
Lampiran 2. Surat Kesanggupan Sebagai Dosen Pembimbing TA .....	90
Lampiran 3. Surat Kontrak Penyusunan TA .....	91
Lampiran 5. Surat Permohonan Validasi Instrumen TAS .....	92
Lampiran 6. Surat Pernyataan Validasi Instrumen Penelitian TAS.....	94
Lampiran 7. Hasil Validasi Instrumen Penelitian TAS.....	96
Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Instrumen .....	97
Lampiran 9. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen .....	98
Lampiran 10. Kisi-kisi Instrumen .....	99
Lampiran 11. Instrumen .....	101
Lampiran 12. Surat Izin Penelitia Fakultas .....	108
Lampiran 13. Data Penelitian.....	109

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki misi utama untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Selain itu, lulusan SMK juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi) dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai wirausaha mandiri (Amat Jaedun, 2016).

Menurut (Kemdikbud R.I, 2016), pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang untuk lebih mampu bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu daripada di bidang pekerjaan lainnya. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap lulusan SMK memiliki kedalaman keahlian pada suatu bidang yang lebih untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Berdasarkan pengertian di atas, SMK dibangun untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka di SMK. Jika para siswa SMK dapat langsung bekerja setelah lulus, maka akan berpeluang untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Namun, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, dalam setahun terakhir pengangguran meningkat 10 ribu orang dan porsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,63 persen (Badan Pusat Statistik, 2019).

Fakta di atas mengisyaratkan adanya permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK selama ini. Selain permasalahan terbatasnya lapangan pekerjaan akibat pertumbuhan ekonomi negara yang belum sesuai harapan, tingginya angka pengangguran tersebut mengisyaratkan adanya permasalahan *mis-match* antara *supply and demand*, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun relevansi bidang keahlian antara tenaga kerja yang diluluskan SMK dengan kebutuhan dunia usaha/industri.

Data ini juga mengungkapkan bahwa untuk memasuki dunia kerja, lulusan SMK masih menghadapi banyak tantangan. Menurut Sitorus (2016), setidaknya terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh para lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja, yaitu: (a) kurikulum SMK tidak terkait atau kurang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga kompetensi lulusan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan DU/DI; (b) kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di SMK, termasuk kurangnya fasilitas pengujian kompetensi dan fasilitas sertifikasi lulusan SMK. Selain butir (a) dan (b) di atas, sekolah juga perlu lebih mengarahkan lulusannya untuk menjadi wirausaha, sehingga dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi tingkat pengangguran lulusan SMK. Untuk itu, proses pembinaan kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi siswa dan lulusan SMK menjadi hal yang sangat diperlukan.

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, juga diupayakan melalui penerbitan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Revitalisasi pendidikan di SMK terutama menyangkut perubahan filosofi dari *supply-driven* ke arah *demand-driven*. Adapun secara operasional revitalisasi pendidikan di SMK diantaranya diwujudkan dalam bentuk: (1) peningkatan kerjasama antara SMK dengan DU/DI, (2) pelibatan dan pemanfaatan DU/DI sebagai tempat praktik kerja lapangan (PKL), tempat magang kerja, dan tempat belajar manajemen dunia kerja, dan (3) penyelarasan kurikulum SMK, sesuai dengan model dual system yang diterapkan, baik dalam penetapan kegiatan praktik kerja maupun pembelajaran melalui *teaching factory*.

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu bidang industri yang melaksanakan kegiatan pembangunan/pekerjaan konstruksi. Produk dari industri jasa konstruksi adalah bangunan gedung, jalan, jembatan, rel, jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Luasnya cakupan pekerjaan dalam industri jasa konstruksi memerlukan tenaga kerja dan bahan bangunan yang besar. MetroTV News dalam artikel berjudul GAPENSI: Pasar Konstruksi Nasional Dikuasai Kontraktor Besar menyebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kontribusi lebih dari 67% terhadap pasar konstruksi di ASEAN, dimana pertumbuhan pasar konstruksi tertinggi ASIA saat ini berada di Jakarta (Antara, 2015). Peningkatan nilai pekerjaan konstruksi di Indonesia menjadikan Indonesia salah satu pasar konstruksi terbesar di ASEAN. Pasar konstruksi terdiri dari pasar pekerjaan konstruksi (proyek konstruksi yang akan dibangun), pasar tenaga kerja konstruksi, dan pasar bahan konstruksi. Nilai investasi infrastruktur di Indonesia pada tahun

2010 – 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 1700 trilyun rupiah yang berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja konstruksi, baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja terampil sebanyak 48 juta orang (Kesai, 2014: 4). Sedangkan kondisi pada bulan Februari 2019 tenaga kerja di industri jasa konstruksi berjumlah 7,7 juta orang (BPS, 2019: 52). Oleh karena itu, kebutuhan tenaga kerja konstruksi di Indonesia masih tinggi dan perlu diimbangi dengan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga keterserapan calon tenaga kerja di industri jasa konstruksi meningkat.

Sementara itu, dengan pemberlakuan *Asean Framework Agreement on Services* (AFAS), telah disepakati bahwa semua pekerjaan konstruksi di Indonesia harus dilaksanakan dengan mengacu standar internasional. AFAS merupakan salah satu persetujuan dalam upaya pembentukan kesatuan wilayah ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community atau AEC*) yang berfokus pada pembebasan arus jasa di seluruh negara bagian ASEAN (Sekertariat ASEAN, 2010: 24 dan Luz, 2014: 4). Salah satu *Mutual Recognition Agreements* (MRA) terkait AFAS adalah penyatuhan pasar jasa ASEAN pada bidang jasa keteknikan, keperawatan, arsitektur, survei lahan, praktik medis, praktik gigi, dan akuntansi (Sekertariat ASEAN, 2008: 38). Persetujuan AFAS berdampak pada sektor pencarian kerja berupa peningkatan persaingan kerja untuk semua pekerjaan di seluruh negara ASEAN (Arif Bintoro Johan, 2015: 5), khususnya pada jenis dan lapangan pekerjaan yang telah disepakati dalam MRA tersebut, tidak terkecuali dalam industri jasa konstruksi.

Konsultan perencana adalah orang atau badan yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, maupun bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan. Konsultan perencana adalah suatu badan hukum atau perorangan yang diberi tugas oleh pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain bangunan sesuai dengan keinginan pemilik proyek. Selain itu tugas konsultan perencana yaitu memberikan saran dan pertimbangan akan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan proyek tersebut. Perencana juga bertugas untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas hal-hal yang kurang jelas terhadap gambar rencana dan rencana kerja dan syarat-syarat. Perencana juga harus membuat gambar revisi bila terjadi perubahan-perubahan rencana dalam proyek. Pekerjaan perencanaan meliputi perencanaan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, anggaran biaya serta memberikan saran yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan (Ervianto, 2005).

Konsultan perencana kontruksi harus memiliki kompetensi tertentu agar dapat dikatakan layak karena tanggung jawab yang dimiliki pekerjaan ini sangat penting dalam sebuah proyek kontruksi. Pekerjaan konsultan perencana membutuhkan lulusan SMK yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan industri jasa kontruksi. Seperti fakta yang ada bahwa banyaknya pengangguran dari SMK bisa disebabkan oleh pekerjaan jasa kontruksi membutuhkan tanggung jawab yang besar dan kompetensi yang memadai.

Ketidak-terserapan lulusan SMK dapat disebabkan karena masalah kuantitas (jumlah calon tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja sedikit) atau karena kualitas, yaitu ketidaksesuaian antara keahlian lulusan dengan bidang

pekerjaan yang dibutuhkan industri (lulusan banyak namun bukan yang dibutuhkan industri, industri membutuhkan namun lulusan yang memiliki keahlian sesuai yang dipersyaratkan sedikit, atau lulusan bekerja di industri tetapi tidak bekerja sesuai kompetensi yang dimilikinya).

Ketidaksesuaian antara keahlian lulusan SMK dengan pekerjaan sebenarnya dapat diselesaikan dengan pelatihan kembali oleh industri. Namun, industri jarang yang bersedia melaksanakannya karena pelatihan membutuhkan tenaga, waktu, tempat, dan biaya sehingga kurang menguntungkan bagi industri. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian mengenai relevansi kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri. Hal ini dilakukan untuk mencari informasi kompetensi apa yang dimiliki lulusan SMK, kompetensi apa yang perlu untuk dimiliki tenaga kerja bidang konstruksi, dan apakah kompetensi kerja yang dimiliki oleh lulusan SMK telah sesuai atau relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja bidang konstruksi. Hasil penelitian akan menjadi masukan untuk pengembangan kurikulum SMK, dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan industri sehingga keterserapan lulusan SMK di dunia industri jasa konstruksi dapat ditingkatkan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah-masalah dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Tingkat pengangguran terbuka masih didominasi lulusan SMK

2. Permasalahan *mis-match* antara *supply and demand*, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun relevansi bidang keahlian antara tenaga kerja yang diluluskan SMK dengan kebutuhan DU/DI
3. Kurikulum SMK tidak terkait atau kurang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga kompetensi lulusan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan DU/DI
4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di SMK, termasuk kurangnya fasilitas pengujian kompetensi dan fasilitas sertifikasi lulusan SMK
5. Kurangnya SMK mengarahkan lulusannya untuk menjadi wirausaha, sehingga dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi tingkat pengangguran lulusan SMK.
6. Kebutuhan tenaga kerja konstruksi di Indonesia masih tinggi dan perlu diimbangi dengan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, diketahui bahwa permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri jasa konstruksi. Dalam penelitian diperlukan pembatasan masalah agar penelitian nanti dapat lebih fokus. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada kompetensi lulusan SMK teknologi konstruksi dan properti yang dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang biro konsultan perencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah: kompetensi kerja apa sajakah yang dibutuhkan oleh industri jasa konstruksi bidang biro konsultan perencana di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para lulusan SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti?

## **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri jasa konstruksi bidang biro konsultan perencana konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para lulusan SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti.

## **F. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak tertentu, instansi, dan organisasi terkait dengan dunia pendidikan terutama pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penyusun, dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori yang pernah diterima selama kuliah dan mendorong penulis untuk belajar memahami, menganalisa dan memecahkan masalah.
2. Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan penyusunan kompetensi sehingga dapat membantu meningkatkan mutu hasil dan proses pembelajaran
3. Bagi Sekolah, penelitian ini dapat difungsikan sebagai evaluasi kompetensi SMK Program Keahlian Teknologi Kontruksi dan Properti yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta serta lulusannya dapat terserap di dunia industri jasa kontruksi khususnya bidang konsultan perencana.
4. Bagi Industri Jasa Kontruksi, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merektur tenaga kerja terutam untuk konsultan perencana.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi tambahan/kajian lebih mendalam bagi penelitian yang relevan.